STANDARD KOMPETENSI TI BAGI PUSTAKAWAN

Ketika seorang pilot, katakanlah pilot A, hendak menerbangkan pesawat Boing 747 yang sarat dengan penumpang, maka ia dipastikan sudah memiliki ijin untuk menerbangkan pesawat tersebut. Seorang pilot pesawat Fokker 100, katakan pilot B, tidak mungkin diijinkan untuk menerbangkan boing 747. Maka dikatakan bahwa pilot A tersebut sudah berkompeten (memiliki kompetensi) dalam hal menerbangkan pesawat Boing 747 sehingga ia dapat menerbangkan pesawatnya dan kemudian mendaratkan kembali dengan selamat. Standar kompetensi pada profesi pilot sangatlah penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebab profesi ini menyangkut keselamatan nyawa banyak manusia. Namun demikian, sekarang ini banyak organisasi, karena tuntutan mutu, juga mulai menerapkan standar kompetensi dalam menerima pegawai baru. Sesuai dengan pernyataan LGI (2002) "*More and more organizations are incorporating individual competencies into their hiring and performance management systems…. Competencies offer a framework for organizations to use to focus their limited resources*". Masalah kompetensi itu menjadi penting, karena kompetensi menawarkan suatu kerangka kerja organisasi yang efektif dan efisien dalam mendaya-gunakan sumber-sumber daya yang terbatas. Seseorang yang memiliki kompetensi dalam profesinya akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik serta efisien, efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan sasaran.

Kompetensi atau *competency* adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas/ pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan (Masyarakat Kelistrikan Indonesia).

Salah satu tujuan dalam melaksanakan standar kompetensi adalah untuk mengantisipasi persaingan bebas (AFTA, APEC dan sebagainya), khususnya bagi pasar tenaga kerja antar negera. Seperti kita ketahui pada era global setiap negara harus membuka kesempatan dan kerjasama seluas-luasnya antar negara. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tenaga kerja Indonesia harus mempunyai daya saing tinggi untuk memenangkan persaingan pasar tenaga kerja. Standar kompetensi ini akan meningkatkan daya saing SDM Indonesia di pasar bebas.

Perpustakaan merupakan suatu unit organisasi modern juga harus selalu memikirkan peningkatan kinerjanya. Oleh karena itu perpustakaan memerlukan pustakawan dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Standar kompetensi pustakawan harus mulai diterapkan untuk memperoleh SDM pustakawan yang dapat meningkatkan kinerja layanan perpustakaannya, khususnya di perpustakaan perguruan tinggi yang memiliki pengguna dari kalangan akademisi. Dengan masuknya teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan maka standar kompetensi pustakawan harus pula bertambah. Kompetensi tambahan yang harus dimiliki oleh pustakawan masa depan sekurang-kurangnya antara lain adalah:

- Kemampuan dalam penggunaan komputer (*computer literacy*);
- Kemampuan dalam mengusasi basisdata (*databases*);

- Kemampuannya dalam penguasaan peralatan teknologi informasi (*tools and technology skill*);
- Kemampuan dalam penguasaan teknologi jaringan (*computer networks*);
- Kemampuan dalam pengusaan internet dan/atau intranet (*internet and intranet*)

Setidaknya ada 10 posisi (jabatan non struktural/pekerjaan) di perpustakaan masa depan yang bersentuhan langsung dengan kompetensi TI (LGI, 2002) yaitu: (1) *Computer Operator*; (2) *Electronic Resources Technician*; (3) *Library Automation Administrator*; (4) *Manager PC Systems*; (5) *PC Coordinator* ; (6) *PC Technician*; (7) *Systems and Network Administrator*; (8) *Systems and Network Manager*; (9) *Web Services Assistant*; (10) *Web Services Librarian*.

Untuk menerapkan standar kompetensi ini memang tidak mudah. Standar kompetensi ini harus diinisiasi oleh organisasi profesi seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ataupun Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (untuk perpustakaan perguruan tinggi). Organisasi ini harus membentuk Tim yang akan merumuskan Standar Kompetensi Pustakawan yang mempunyai tugas utama mengembangkan standar kompetensi, pengembangan kurikulum, pengembangan dan penyelenggaraan institusi pendidikan dan pelatihan. Sedangkan Tim lainnya yang harus dibentuk adalah Tim yang akan merumuskan pengawasan dan data informasi.

Pada dasarnya Standar Kompetensi suatu bidang keahlian, merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Pengembangan Sumber daya Manusia yang memberikan informasi tentang standar minimal kompetensi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau profesi. Skematik kedudukan standar kompetensi tersebut diilustrasikan dengan bagan sebagai berikut:

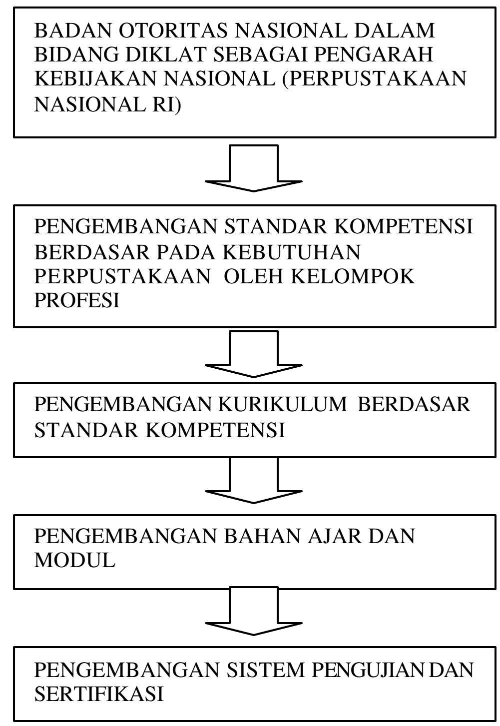

Perlu diingat disini bahwa pengembangan standar kompetensi seharusnya merujuk kepada sistem nasional mengenai ketenaga-kerjaan yaitu UU no. 13 Tahun 2003 meng-enai ketenaga kerjaan (Utomo, 2004).

Pemberlakuan standar wajib ditetapkan oleh regulator terkait sepanjang tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif dan hambatan teknis dalam penerapannya. Sedangkan pelaksanaan sistem penilaian dilakukan oleh pihak ketiga seperti lembaga/organisasi sertifikasi yang terakreditasi.

Ide untuk menerapkan Standard kompetensi TI bagi Pustakawan ini dilontarkan sebagai pemikiran awal bagi tersedianya tenaga pustakawan yang berkeahlian komputer. Alasannya adalah di masa depan perpustakaan tidak akan dan tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dan mengakses bahan-bahan perpustakaan seperti jurnal elektronik, buku elektronik, multimedia, internet, basisdata electronik dan lain-lain. Bukankah perpustakaan saat ini sudah menuju ke *digital* dan *virtual library*? Kalau saat ini masih ada kombinasi koleksi antara digital dengan konvensional (hybrid library), maka suatu ketika perpustakaan itu akan menuju ke perpustakaan digital (dan virtual). Untuk menindak lanjuti ide ini diperlukan diskusi intens untuk mendapatkan formula yang dapat diterapkan di bidang atau profesi pustakawan. Jika nanti Standar ini bisa diterapkan, dan standar ini memenuhi standar internasional, maka bukan mustahil jika pustakawan Indonesia dapat juga diterima bekerja di negara lain dengan standar gaji yang sama dengan yang diberlakukan di negara yang bersangkutan.

Bacaan:

Local Government Institut / LGI. (2002). *Core Competencies for Library Systems: Word Processing Document Files*. University Place, WA: LGI.

Masyarakat Kelistrikan Indonesia. *Standard Kompetensi Bidang Keahlian Ketenaga-listrikan*.

Utomo, B.S. (2004). *Pokok-pokok pikiran pengembangan standar kompetensi kepustaka-wanan*. Bahan diskusi di PNRI (tidak dipublikasi).(ARS).